



DOKUMEN PERENCANAAN



**SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020-2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

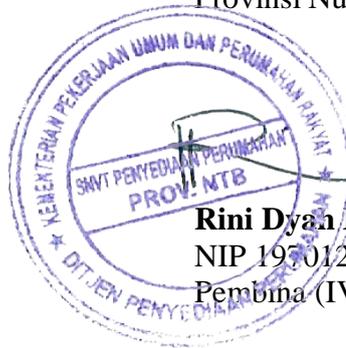
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga Dokumen Perencanaan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 dapat tersusun.

Penyusunan Dokumen Perencanaan ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan kepada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Rencana Kinerja ini akan diuraikan rumusan Tujuan yang dilengkapi dengan Outcome Kegiatan pada wilayah kerjanya berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program, target kinerja, kerangka pendanaan dan kebijakan pada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dokumen Perencanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Mataram, September 2020
Kepala SNVT Penyediaan Perumahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Rini Dyan Mawarty, ST., MT
NIP 19701215 199803 2 007
Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	9
2.1 Tujuan Satuan Kerja	9
2.2 Output Kegiatan Satuan Kerja	11
BAB III TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	12
3.1 Target Kinerja	12
3.2 Kerangka Pendanaan	15
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Matrik kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai salah satu kebutuhan primer dan mempunyai fungsi yang strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang serta merupakan pengejawantahan jati diri, terwujudnya kesetaraan rakyat. Yang dalam kehidupan pembangunan nasional juga merupakan kehendak bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Salah satu segi dari pembangunan nasional yaitu pembangunan perumahan yang ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Perumahan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, bukanlah merupakan kebutuhan individual namun merupakan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, akan tetapi tidak semua masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah yang layak dan sehat serta aman, sehingga upaya untuk menambah pembangunan perumahan dan pemukiman harus terus ditingkatkan dengan harga yang terjangkau terutama dari golongan masyarakat yang penghasilan rendah. Hal tersebut tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain sebagai amanat dari Undang-undang, perumahan juga merupakan salah satu aspek prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi dari Presiden RI yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk mendukung implementasi program penyediaan perumahan SNVT Penyediaan Perumahan khususnya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahun 2020 SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1.1 Capaian pada perencanaan sebelumnya

Kebijakan nasional di bidang perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019 mencantumkan perluasan akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multisistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi :

- a. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
- b. Pembangunan Rumah Khusus
- c. Pembangunan Rumah Susun
- d. Dan Pemeliharaan/Revitalisasi Rumah Susun

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR tertuang dalam Renstra Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa Ditjen Perumahan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi: (1) Pengendalian Perumahan Komersial; (2) Penguatan Perumahan Umum dan Rumah Susun; (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya; dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus.

Target Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yaitu: (1) Pembangunan Rumah Susun sebanyak 550.000 unit; (2) Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 50.000 unit; (3) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 1.500.000 unit; (4) Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 250.000 unit; dan (5) Bantuan PSU Rumah Umum sebanyak 676.950 unit. Namun disayangkan dalam 5 tahun berjalan, target renstra tidak dapat dicapai. Hingga tahun 2019, capaian yang diperoleh yaitu: (1) Pembangunan Rumah Susun sebanyak 49.581 unit atau 9,1%; (2) Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 23.934 unit atau 48,9%; (3) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 698.864 unit atau 44,2%; (4) Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 34.480 unit atau 15,1%; dan (5) Bantuan PSU Rumah Umum sebanyak 119.647 unit atau 17,4%.

Capaian kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2019 terhadap Renstra 2015-2019 adalah sebagaimana yang tercantum dalam table di bawah ini :

NO	PROGRAM	CAPAIAN (unit)					TOTAL CAPAIAN (unit)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Pembangunan Rumah Susun	-	-	107	163	58	328

2.	Revitalisasi Rumah Susun			4 tower	1 tower	6 tower	
3.	Pembangunan Rumah Khusus	-	-	204	183	125	512
4.	Revitalisasi Rumah Khusus	-	-	40	-	6	
5.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	-	-	3.547	3.152	4.663	11.362
6.	Bantuan PSU Rumah Umum	-	-	-	-	-	-
	TOTAL						12.202

1.2 Potensi

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan rakyat adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan, termasuk dukungan kebijakan-kebijakan penyediaan perumahan terhadap ketersediaan dan harga lahan, efisiensi proses dan biaya perizinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu SNVT Penyediaan Perumahan Povinsi NTB memenuhi kebutuhan hunian yang layak yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, melalui fasilitasi bantuan PSU Rumah umum, penyediaan rumah susun, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Meninjau kembali dari capaian kinerja sebelumnya, terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan guna mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Skema bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dapat dioptimalkan dalam mewujudkan opsi pembiayaan baik berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih

Bungan (SSB) dan juga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Pemanfaatan teknologi dan inovasi perumahan dapat dikembangkan sebagai metode maupun alat bantu dalam proses pemenuhan kebutuhan perumahan. Pengembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi MBR juga sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni sekaligus mendukung program padat karya.

Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dengan kata lain masih terjadi backlog. Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni. Hal tersebut berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (*urban area*) yang terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Delivery system penyediaan perumahan yang belum optimal serta alokasi anggaran yang tidak sesuai target dengan gap pembiayaan yang cukup tinggi, merupakan permasalahan yang memberi andil cukup besar tidak tercapainya target renstra sebelumnya.

Ketersediaan basis data perumahan masih belum menjadi sebuah prioritas dan kebutuhan bagi pemerintah daerah, sehingga mempersulit perencanaan untuk menentukan langkah dan kebijakan terkait perumahan di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah daerah masih mengandalkan program Kementerian PUPR dengan anggaran APBN dalam penanganan permasalahan perumahan di daerah.

Di samping pemerintah daerah, pelaku yang juga perlu diberdayakan adalah masyarakat dan dunia usaha, termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. Peran dunia usaha seharusnya dikembalikan sebagai investor yang efektif dan sebagai generator pengembangan kawasan. BUMN harus didorong untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting pembangunan.

Dari berbagai permasalahan diatas, terdapat tantangan penyediaan perumahan, yaitu :

1. Keterpaduan penanganan dan pembinaan daerah

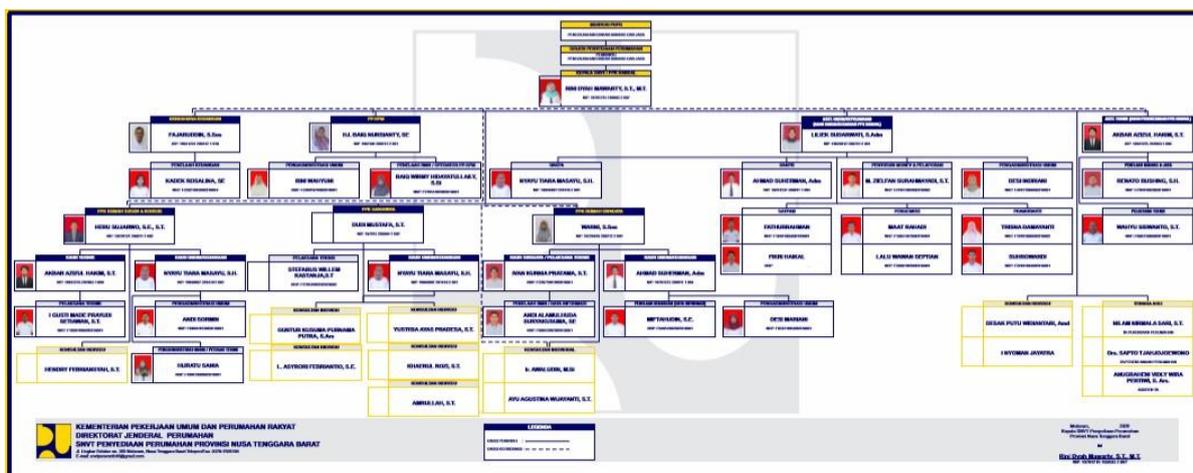
2. Penerapan housing career dalam pemenuhan penyediaan hunian
3. Pembangunan rumah skala besar dan hunian berimbang
4. Pembangunan hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi (TOD)
5. Pemenuhan hunian bagi kaum milenial
6. Pemenuhan kebutuhan rumah ASN, TNI/POLRI
7. Pemenuhan perumahan berbasis komunitas dan kelompok

Tantangan-tantangan tersebut dapat dijawab dengan peluang-peluang yang ada, antara lain :

1. Mengefektifkan keswadayaan masyarakat
2. Pemanfaatan creative financing (Tapera, SBSN, CSR, dll)
3. Pemanfaatan lahan untuk perumahan (Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD)
4. Pemanfaatan KPBU dalam pembangunan perumahan
5. Kolaborasi dan kerjasama antar stakeholders perumahan
6. Perumahan buruh menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi

1.2.1 Struktur Organisasi

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan perumusan struktur organisasi Tahun Anggaran 2020 yang dapat dilihat pada gambar berikut.



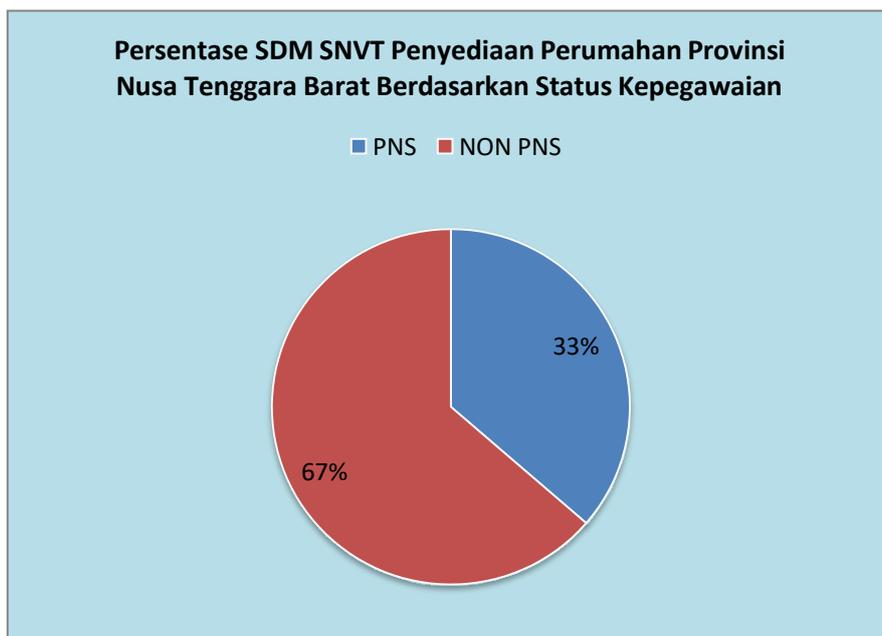
1.2.2 Kondisi SDM

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2020 yaitu antara lain sebagai berikut:

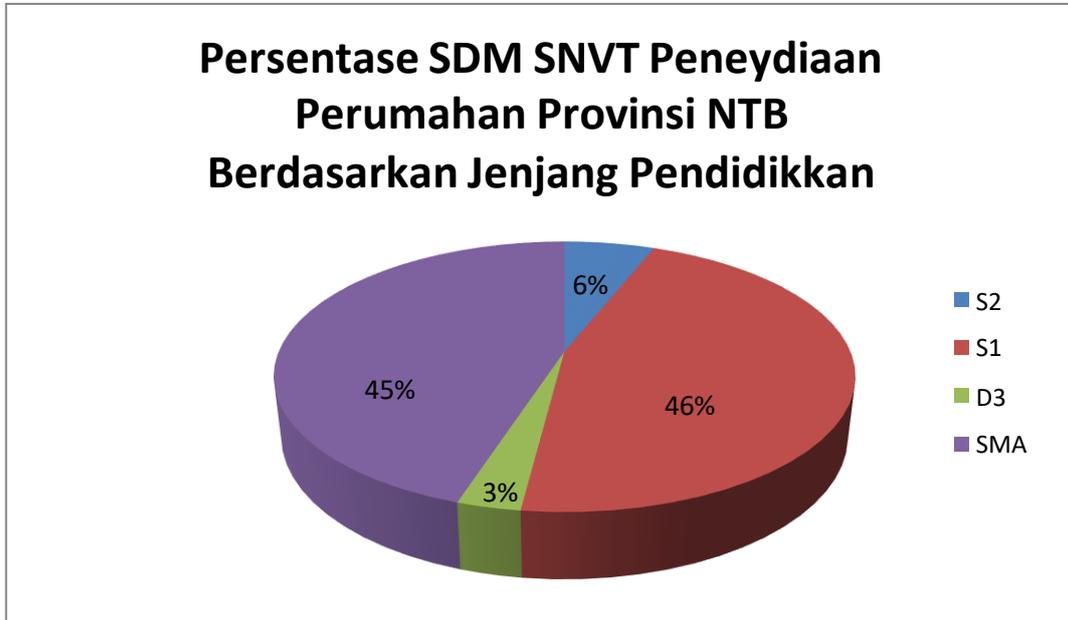
Tabel 3. 1
**Sumber Daya Manusia di SNVT Penyediaan Perumahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Status Pegawai	Jenjang Pendidikan					Total
	SMA	D3	S1	S2	S3	
PNS	1	1	7	1	0	10
NON PNS	11	0	8	1	0	20
TOTAL	13	1	13	2	0	30

Gambar 3. 1 Persentase SDM SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Status Pegawai



Gambar 3. 2 Persentase SDM SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Adapun rincian pegawai di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jabatannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2

**Sumber Daya Manusia di SNVT Penyediaan Perumahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Nama	Jabatan	Pegawai PNS/Non PNS	Pendidikan			
				S2	S1	D3	SLTA
1	Rini Dyah Mawarti, ST., MT.	Kasatker	PNS	Teknik Sipil	-	-	-
2	Warni, S.Sos	PPK Rumah Swadaya	PNS		-Sosial	-	-
3	Heru Sujarwo, SE., ST	PPK Rumah Susun & Rumah Khusus	PNS		Ekonomi dan Teknik Sipil		-
4	Fajaruddin, S.Sos	Bendahara Pengeluaran			Sosial		
5	Hj. Baiq Nursianty, SE	PP-SPM	PNS	-	Ekonomi	-	-
6	Lilik Sudarwanti, S.Adm	Asisten Umum	PNS	-	Administrasi Negara	-	-
7	Akbar Azizul Hakim, ST	Asisten Teknik	PNS	-	- Teknik Arsitektur	-	
8	Ahmad Suherman, A.Md	Petugas BMN dan Kaur Keu. PPK Ruswa	PNS	-	-	Akuntansi	-
9	Nyayu Tiara Masyayu , SH	Petugas UAKPA dan Kaur Keu. PPK Rusun Rusus	PNS	-	Hukum	-	
10	Wahyu Siswanto, ST	Pelaksana Teknik	Non PNS	-	- Teknik Sipil	-	-
11	Kadek Rosalina, SE	Petugas LPJ	Non PNS	-	-Ekonomi	-	-
12	Baiq Wirmy Hidayatullaily, S.Si	Staf PP-SPM	Non PNS		-Matematika	-	-
13	I Gusti Made Prayudi Setiawan, ST	Staf Teknik PPK Rusus	Non PNS	-	-Teknik Sipil	-	-
14	Miftahudin, SE	Staf PPK Ruswa	Non PNS	-	-Ekonomi	-	-
15	Andi Alamul Huda S, SE	Penelaah BMN/Data Informasi	Non PNS	-	-Ekonomi	-	-
16	M. Zielfan Surahmayadi, ST	Petugas e-Mon	Non PNS		-Teknik Sipil		
17	Ivan Kurnia Pratama, ST	Staf PPK Ruswa	Non PNS	-	-Teknik Elektro	-	-
18	Renato Bushing, SH.MH	Penelaah Barang dan Jasa	Non PNS	Hukum	-	-	
19	Hijratu Sania	Staff Ass. Uum	Non PNS	-	-	-	STM

	Andi Sormin	Staf Teknik PPK Rusun	Non PNS				STM
21	Rini Wahyuni	Staff Ass. Uum	Non PNS	-	-	-	SMK
22	Desi Indriani	Staf Ass. Umum	Non PNS	-	-	-	SMA
23	Trisna Damayanti, A.Md	Pramubakti	Non PNS	-	-	-	SMA
24	Desi Mariani	Staf PPK Ruswa	Non PNS	-	-	-	SMK
25	Maat Rahadi	Pengemudi	Non PNS	-	-	-	SMA
26	Suhrowardi	Pramubhakti	Non PNS	-	-	-	SMA
27	Fikri Haikal	Satpam	Non PNS	-	-	-	SMA
28	Faturrahman	Satpam	Non PNS	-	-	-	SMA
29	Lalu Wawan Septian	Pengemudi	Non PNS	-	-	-	SMA
Total			29 Orang	2 org	15	1 org	11org

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang bagi produktifitas kinerja suatu organisasi. Dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kerja maka diharapkan dapat memaksimalkan produktifitas kinerja pegawai suatu organisasi. Adapun sarana dan prasarana di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi sebagai berikut:

Tabel 3. 3
**Sarana dan Prasarana SNVT Penyediaan Perumahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Kode Barang	Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	16	Buah	14	-	-
2.	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	Buah	1	-	-
3.	3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah	1	-	-
4.	3.05.01.04.013	Buffet	1	Buah	1	-	-
5.	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	Buah	1	-	-
6.	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2	Buah	1	-	-

7.	3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	Buah	1	-	-
8.	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	44	Buah	35	-	-
9.	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	92	Buah	75	-	-
10.	3.05.02.01.005	Sice	2	Buah	2	-	-
11.	3.05.02.01.008	Meja Rapat	5	Buah	3	-	-
12.	3.05.02.04.001	Lemari Es	1	Buah	1	-	-
13.	3.05.02.04.004	A.C. Split	14	Buah	8	-	-
14.	3.05.02.05.015	Rak Piring Aluminium	1	Buah	1	-	-
15.	3.05.02.06.002	Televisi	2	Buah	2	-	-
16.	3.05.02.06.017	Unit Power Supply	2	Buah	2	-	-
17.	3.06.01.01.036	Microphone/Wirless Mic	3	Buah	3	-	-
18.	3.06.01.01.077	Blitzzer	1	Buah	1	-	-
19.	3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	Buah	1	-	-
20.	3.06.01.02.128	Camera Digital	5	Buah	5	-	-
21.	3.06.01.02.158	Monopod	1	Buah	1	-	-
22.	3.06.01.02.999	Peralatan Studio Video dan dan Film Lainnya	4	Buah	4	-	-
23.	3.06.01.05.038	GPS Receiver	1	Buah	1	-	-
24.	3.06.01.05.047	Kamera Udara	1	Buah	1	-	-
25.	3.06.02.01.010	Facsimile	1	Buah	1	-	-
26.	3.10.01.02.001	P.C. Unit	6	Buah	3	-	-
27.	3.10.01.02.002	Laptop	17	Buah	13	-	-
28.	3.10.01.02.009	Tablet PC	1	Buah	1	-	-
29.	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Buah	15	-	-
		JUMLAH	247	Buah	199	-	-

1.3 Permasalahan Penyelenggaraan Perumahan

Permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan mencakup:

a. Akses Lahan Perumahan

Permasalahan lahan yang sering ditemui antara lain

- Lahan yang disiapkan pengusul (pemda/kementerian/lembaga) belum memenuhi kriteria program bantuan perumahan.
- Harga lahan di kawasan perkotaan dan pusat - pusat kegiatan tidak terkendali.
- Adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan, dan spekulasi lahan yang dilakukan pihak pengembang swasta besar.
- Sengketa lahan dan konflik agraria.

b. Pendanaan dan Pembiayaan

Keterbatasan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan perumahan menjadi salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan bagi MBR. Pada periode 2015-2019, kebutuhan anggaran penyediaan perumahan bagi MBR; sebesar 184,7 T Rupiah sedangkan ketersediaan dana hingga 2019 hanya 42,4 T Rupiah. Terdapat gap 142,3 T Rupiah antara ketersediaan anggaran dengan yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendanaan penyediaan perumahan belum dapat mengandalkan pemerintah sepenuhnya. Perlu upaya sumber alternatif termasuk pihak ketiga seperti swasta dan masyarakat.

c. Basis Data Perumahan

Permasalahan mendasar berikutnya dalam penyelenggaraan perumahan di Indonesia adalah basis data perumahan belum memadai. Ketersediaan data penting untuk alat perencanaan, pengendalian, eksekusi, dan pengambilan keputusan, menentukan jenis dan metode pelaksanaan kegiatan pembangunan, menentukan kebutuhan SDM dan waktu; dan lain sebagainya. Ketersediaan basis data dapat membantu pemimpin dalam menentukan kebutuhan jumlah rumah, penempatan penyelenggaraan perumahan diseluruh wilayah Indonesia, besar pembiayaan yang disediakan pemerintah; dan delivery system dalam penyelenggaraan perumahan dengan cepat akurat. Belum tersedianya basis data perumahan berdampak pada hasil kinerja penyelenggaraan perumahan kurang tepat sasaran, metode kurang efektif dan efisien, dan atau kegagalan dalam menentukan dan mencapai target penyelenggaraan rumah. Basis data dan informasi bidang perumahan belum reliabel dan belum sistematis di semua level, pusat hingga daerah. Selain itu, sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan terkini baik RTRW, RDTR, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini tentu menghambat perencanaan dan pembangunan perumahan

d. *Backlog* Rumah

Backlog perumahan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, *backlog* perumahan adalah kuantitas rumah yang belum tersedia. *Backlog* perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah per satu rumah tangga

atau kepala keluarga. Terdapat perbedaan sudut pandang dalam menentukan *backlog* perumahan antara Kementerian PUPR dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Perspektif Kementerian PUPR; *backlog* rumah dihitung terhadap rumah yang belum layak huni. Perspektif BPS; *backlog* rumah dihitung terhadap gap kepemilikan rumah. Dengan adanya perbedaan tersebut, kecenderungan angka *backlog* perumahan Kementerian PUPR lebih kecil dari *backlog* BPS.

Perbedaan perspektif ini sangat terkait dengan intervensi yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan *backlog* perumahan. *Backlog* pada Kementerian PUPR adalah mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di RTLH. Intervensi pemerintah lebih terfokus pada usaha peningkatan penduduk agar tinggal di rumah yang layak huni.

e. Delivery System

Minimnya alokasi APBD dapat mempengaruhi kontribusi pencapaian akses masyarakat terhadap perumahan. Alokasi anggaran program perumahan (kawasan permukiman) masih sangat minim. Keterbatasan kapasitas juga terjadi dari sisi perencanaan dan kelembagaan. Penanganan perumahan masih diartikan sebatas pada peningkatan kualitas rumah dalam bentuk bedah rumah, padahal fasilitasi penyediaan perumahan juga mencakup perbaikan delivery system dari sisi supply dan demand, dimulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, hingga meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan. Dari sisi kelembagaan, rendahnya kapasitas penyelenggara dan kelembagaan sistem terlihat dari belum optimalnya kinerja penyelenggara layanan dasar. Permasalahan fungsi regulator dan operator layanan dasar juga masih terjadi di daerah.

f. Kepastian Hukum

Rumah merupakan tanggung jawab masyarakat secara mandiri, namun kompleksnya permasalahan di bidang PKP mengharuskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turun tangan dan mendukung dalam penyediaannya proses pendudukan penyediaan perumahan, pemerintah bertindak sebagai regulator pembuat aturan dan kebijakan terkait dengan penyediaan perumahan.

Rumah merupakan tanggung jawab masyarakat secara mandiri, namun kompleksnya permasalahan di bidang PKP mengharuskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turun tangan dan mendukung dalam penyediaannya. Dalam proses pendudukan penyediaan perumahan, pemerintah bertindak sebagai regulator pembuat aturan dan kebijakan terkait dengan penyediaan perumahan.

g. Kemitraan Kolaborasi

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan permasalahan yang multi dimensi serta melibatkan bidang terkait dan partisipasi pelaku lain. Tanpa dukungan bidang terkait dan partisipasi pelaku lain, pengembangan perumahan hanya akan menghasilkan kumpulan rumah dalam lingkungan atau kawasan permukiman dengan penghuninya semata. Dengan dukungan bidang terkait dan partisipasi pihak lain, pengembangan perumahan baru dapat dinikmati manfaatnya termasuk multiplier effect yang tercipta dan kegiatan industri ikutan yang menyertainya.

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan permasalahan yang multi dimensi serta melibatkan bidang terkait dan partisipasi pelaku lain. Tanpa dukungan bidang terkait dan partisipasi pelaku lain, pengembangan perumahan hanya akan menghasilkan kumpulan rumah dalam lingkungan atau kawasan permukiman dengan penghuninya semata. Dengan dukungan bidang terkait dan partisipasi pihak lain, pengembangan perumahan baru dapat dinikmati manfaatnya termasuk multiplier effect yang tercipta dan kegiatan industri ikutan yang menyertainya. perumahan harus dimulai dengan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan perumahan dan permukiman dalam hal ini adalah keterpaduan program pengembangan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan.

Keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan stake holders perlu digalakan. Hal ini berguna dalam mengatasi kekurangan pemerintah. Seperti halnya keterbatasan pendanaan yang dilakukan pemerintah bisa diatasi dengan solusi melakukan kolaborasi dengan pihak BUMN/ BUMD/ BUS dalam penyediaan perumahan (KPBUS). Sedangkan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penyediaan perumahan dapat diatasi dengan melakukan kemitraan dengan pihak penyedia perumahan dapat diatasi dengan melakukan kemitraan dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi penyelenggara perumahan seperti koperasi dan institusi-institusi lain.

h. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan informasi dari HUD Institute Tahun 2017, lebih dari 70% rumah di Indonesia dibangun atas keswadayaan masyarakat. Namun kualitas rumah yang dibangun secara swadaya belum semuanya sesuai dengan standar kelayakan hunian. Oleh karenanya diperlukan pemberdayaan masyarakat yang dibantu oleh TFL (Tim Fasilitator Lapangan) di lapangan terkait penyelenggaraan perumahan, mulai dari perencanaan hingga pasca pembangunan. Namun kondisi di lapangan, pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal. Selain karena rendahnya kesadaran masyarakat berkolaborasi secara aktif, berdasarkan informasi dari Direktorat Rumah Swadaya, kendala yang dihadapi juga karena kurangnya pengalaman TFL dalam bidang teknik pembangunan rumah dan/atau pemberdayaan masyarakat, belum seimbang rasio antara TFL dan penerima bantuan, kurangnya koordinasi antara TFL dengan pelaksana program dan Tim Teknik desa/

kelurahan, serta terbatasnya ketersediaan tenaga tukang dan/atau masyarakat penerima program yang memiliki kemampuan tukang. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam membangun rumah yang berdampak pada kualitas rumah.

i. Permasalahan-permasalahan lainnya

Adapun identifikasi permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan yang dihadapi oleh SNVT Penyediaan Perumahan dalam mewujudkan hunian yang layak, sebagai bentuk peran pemerintah pusat di daerah yakni sebagai berikut :



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Satuan Kerja

Tujuan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan, Penetapan tujuan selain sebagai penjabar visi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga sebagai kerangka dasar dan arah bagi pelaksanaan kebijakan prioritas program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan. Tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penyediaan perumahan ununtuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, melalui fasilitas bantuan PSU, rumah umum, penyediaan rumah susun, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.
- b. Menyelenggarakan penyediaan perumahan yang didukung dengan prasarana dan sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi dan industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, melalui penyediaan perumahan khusus di kawasan tertinggal, Kawasan perbatasan Negara, daerah pasca bencana / konflik dan kawasan maritim / nelayan.
- c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan.
- d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan.

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan membantu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyediaan Perumahan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tugas dan fungsi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu :

a. Tugas

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan Rumah Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- e. Pelaksanaan administrasi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
- g.

c. Visi dan Misi

- Visi

Visi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “Mendukung dan Mensinergikan program strategis nasional di bidang perumahan, permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi program nasional sejuta rumah untuk rakyat”.

- Misi

Misi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendukung beberapa misi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai untuk mendukung layanan
-

infrastruktur dasar dan hunian yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia.

- b. Meningkatkan koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan.

2.1.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I sebagai penjabaran dari tujuan adalah meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, yaitu :

SASARAN		INDIKATOR
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Indikator tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni 2. Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU 2. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR 3. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus 4. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui Pembangunan Rumah Susun

		<p>5. Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan</p> <p>6. Tingkat Pembinaan Kepatuhan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan</p>
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPPPNT1 dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kualitas tata kelola administrasi BPPPNT1
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kualitas dukungan manajemen BPPPNT1
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan BPPPNT1	Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan

2.2 Outcome Kegiatan Satuan Kerja

Tujuan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan rumusan kondisi yang hendak dicapai di akhir periode perencanaan yang secara umum adalah menyelenggarakan perencanaan penyediaan perumahan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, capaian secara terpadu dan komprehensif melalui pengembangan dan penyediaan perumahan, kerjasama semua pemangku kepentingan perumahan, penyediaan data yang akurat dengan pengawasan dan evaluasi kebijakan dan program penyediaan perumahan yang akuntabel. Maka Outcome dari Tujuan diatas tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan, termasuk dukungan kebijakan-kebijakan penyediaan perumahan terhadap ketersediaan dan harga lahan, efisiensi proses dan biaya perizinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Terselenggaranya penyediaan perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, melalui fasilitasi bantuan

PSU Rumah umum, penyediaan rumah susun, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni;

3. Terselenggaranya penyediaan perumahan yang didukung dengan prasarana dan sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi dan industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, melalui penyediaan rumah khusus di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan negara, daerah pasca bencana/konflik dan kawasan maritim/nelayan;
 4. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan; dan
 5. Meningkatnya peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan.
-

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Target SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019, yaitu: (1) Pembangunan Rumah Susun sebanyak 550.000 unit; (2) Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 50.000 unit; (3) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 1.500.000 unit; (4) Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 250.000 unit; dan (5) Bantuan PSU Rumah Umum sebanyak 676.950 unit. Namun disayangkan dalam 5 tahun berjalan, target renstra tidak dapat dicapai. Hingga tahun 2019, capaian yang diperoleh yaitu: (1) Pembangunan Rumah Susun sebanyak 49.581 unit atau 9,1%; (2) Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 23.934 unit atau 48,9%; (3) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 698.864 unit atau 44,2%; (4) Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 34.480 unit atau 15,1%; dan (5) Bantuan PSU Rumah Umum sebanyak 119.647 unit atau 17,4%.

Adapun rincian target pembangunan perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020-2024	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni						
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	15 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	16.515 Unit	5.515 Unit	2.050 Unit	2.120 Unit	3.170 Unit	3.660 Unit
Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	273 Unit	0	153 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit
Jumlah Rumah Khusus Yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	546 Unit	0	87 Unit	139 Unit	173 Unit	147 Unit
Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	30 Tower	4 tower	3 tower	8 tower	9 tower	6 tower
Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	9.520 Unit	0	1.500 Unit	2.063 Unit	2.625 Unit	3.332 Unit

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan BP2P NT 1						
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	9 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	9 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran	9 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan

Penjabaran hasil yang akan dicapai dari setiap Sasaran Program pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Tahun 2020-2024 beserta Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Output Kegiatan.

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN
RUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak dan aman	Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	Pembangunan PSU Rumah MBR
				Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR	Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya
					Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus	
					Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui Pembangunan Rumah Susun	
				Pembangunan rumah khusus	Jumlah rumah khusus yang dibangun	
				Pemeliharaan dan perawatan rumah khusus	Jumlah rumah khusus yang dipelihara	
				Pembangunan rumah susun	Jumlah rumah susun yang dibangun	
				Pemeliharaan dan perawatan rumah susun	Jumlah rumah susun yang dipelihara	
DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan,	Layanan dukungan manajemen satker

						Layanan Perkantoran
						Layanan sarana dan prasarana internal



3.2 Kerangka Pendanaan (Keuangan)

Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 bidang perumahan serta sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka kebutuhan pendanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I adalah sebesar **Rp. 1.000.089.357.923,-** seperti tercantum dalam tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020-2024	ANGGARAN (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni						
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4.447,286	870,384	879,568	888,140	898,702	910,489
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	575.797	164717	60633	83541	123427	143479
Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	54.084	0	26124	9320	9320	9320
Jumlah Rumah Khusus Yang Dipelihara	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	191.995	6039	37269	43202	55455	50030
Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	28.968	1780	2703	8211	9474	6800
Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	122.669	0	28110	28110	35776	45385
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan BP2P NT 1						
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.399,465	151,800	306,803	309,793	313,477	317,589
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4.863,499	527,544	1066,221	1076,612	1089,416	1103,704
Jumlah Layanan Perkantoran	16.586,108	1799,096	3636,160	3671,598	3715,262	3763,989
TOTAL	1.000.089,357923	175.885	146.016	178.330	239.469	261.110

BAB IV

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/SE/M/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan dokumen lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mendukung penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) nantinya maka, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran tentang capaian dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan membuat Dokumen Perencanaan Tahun 2020-2024. Proses pencapaian sasaran-sasaran tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan 2020-2024 SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan melakukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan program, yang dapat mendukung program Direktorat Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2020-2024 SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tidak menutup kemungkinan adanya perubahan program pada pelaksanaannya dan nantinya akan dilihat dan dievaluasi di akhir tahun dalam Akuntabilitas Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lampiran

MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KEGIATAN 1: Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman			5.10 0	2.29 0	2.29 9	3.38 3	3.84 7	16.919	192.461.486	162.375.509	196.423.692	264.693.587	288.694.137	1.104.648.410
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	Unit	0	1.500	2.063	2.625	3.332	9.519	-	15.997.000	33.471.500	42.600.854	54.046.104	146.115.458
2	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR	Unit	5.100	2.050	2.120	3.170	3.660	16.100	180.020.012	70.131.000	89.832.425	132.835.956	154.342.338	627.161.731
3	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus	Unit	0	153	40	40	40	273	451.240	27.927.509	9.791.515	9.791.515	9.791.515	57.753.293
4	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui Pembangunan Rumah Susun	Unit	0	87	139	173	147	546	8.641.410	44.970.000	59.398.908	74.885.918	65.284.836	253.181.072
5	Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Bulan	12	12	12	12	12	12	3.348.824	3.350.000	3.929.344	4.579.344	5.229.344	20.436.856

PELAKSANA: PPK Perencanaan dan Pengendalian															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan		Laporan	3	3	3	3	3	15	870.384	600.000	750.000	900.000	1.050.000	4.170.384
	1	Sinkronisasi dan koordinasi program Pusat - Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	5	227.854	200.000	250.000	300.000	350.000	1.327.854
	2	Jumlah laporan Perencanaan Lingkungan Hunian	Laporan	1	1	1	1	1	5	245.898	200.000	250.000	300.000	350.000	1.345.898
	3	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	1	1	1	1	5	396.632	200.000	250.000	300.000	350.000	1.496.632
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1	5	151.800	250.000	151.800	151.800	151.800	857.200
	1	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5	151.800	250.000	151.800	151.800	151.800	857.200
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1	5	527.544	500.000	527.544	527.544	527.544	2.610.176
	1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5	527.544	500.000	527.544	527.544	527.544	2.610.176
4	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	5	1.799.096	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	12.799.096
	1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.799.096	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	12.799.096

PELAKSANA: PPK Rumah Umum dan Komersial															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Rumah Umum dan Komersial		Laporan	0	2	2	2	2	8	-	2.600.000	5.362.500	6.824.854	8.662.104	23.449.458
	1	Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah umum dan komersial	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	500.000	1.031.250	1.312.472	1.665.789	4.509.511
	2	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan pembinaan rumah umum dan komersial	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	2.100.000	4.331.250	5.512.382	6.996.315	18.939.947
2	Pembangunan PSU Rumah MBR		Unit	0	1.500	2.063	2.625	3.332	9.519	-	13.397.000	28.109.000	35.776.000	45.384.000	122.666.000
	1	Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	0	1.500	2.063	2.625	3.332	9.519	-	13.397.000	28.109.000	35.776.000	45.384.000	122.666.000
PELAKSANA: PPK Rumah Swadaya															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Rumah Swadaya		Laporan	2	1	1	1	1	6	15.304.012	9.498.000	6.292.425	9.408.956	10.863.338	51.366.731
	3	Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Laporan	1	1	1	1	1	5	8.047.300	9.498.000	6.292.425	9.408.956	10.863.338	44.110.019
	4	Jumlah laporan penyiapan dan pelaksanaan bantuan pengembangan sarana hunian pendukung KSPN	Laporan	1	0	0	0	0	1	7.256.712	-	-	-	-	7.256.712

	2	Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya		5.100	2.050	2.120	3.170	3.660	16.100	164.716.000	60.633.000	83.540.000	123.427.000	143.479.000	575.795.000	
	3	Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	4.600	2.050	2.120	3.170	3.660	15.600	95.230.000	60.633.000	83.540.000	123.427.000	143.479.000	506.309.000	
	4	Jumlah bantuan pengembangan sarana hunian pendukung KSPN	Unit	500	-	-	-	-	500	69.486.000	-	-	-	-	69.486.000	
PELAKSANA: PPK Rumah Khusus																
OUTPUT KEGIATAN :																
	1	Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah khusus	Laporan	2	2	2	2	2	10	225.620	1.803.544	471.515	471.515	471.515	3.443.708	
	1	Jumlah laporan perencanaan teknik rumah khusus	Laporan	1	1	1	1	1	5	94.928	100.000	26.144	26.144	26.144	273.359	
	2	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah khusus	Laporan	1	1	1	1	1	5	130.692	1.703.544	445.371	445.371	445.371	3.170.349	
	2	Pembangunan rumah khusus	Unit	0	153	40	40	40	273	225.620	26.123.965	9.320.000	9.320.000	9.320.000	54.309.585	
	1	Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	0	153	40	40	40	273	225.620	26.123.965	9.320.000	9.320.000	9.320.000	54.309.585	
	3	Pemeliharaan dan perawatan rumah khusus	Unit	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	

	1	Jumlah rumah khusus yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PELAKSANA: PPK Rumah Susun															
OUTPUT KEGIATAN :															
	1	Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun	Laporan	2	2	2	2	2	10	822.410	4.999.000	7.986.908	9.957.918	8.454.836	32.221.072
	1	Jumlah laporan perencanaan teknik rumah susun	Laporan	1	1	1	1	1	5	260.000	200.000	319.540	398.396	338.261	1.516.198
	2	Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun	Laporan	1	1	1	1	1	5	562.410	4.799.000	7.667.368	9.559.521	8.116.575	30.704.874
	2	Pembangunan rumah susun	Unit	0	87	139	173	147	546	6.039.000	37.269.000	43.201.000	55.455.000	50.030.000	191.994.000
	1	Jumlah rumah susun yang dibangun	Unit	0	87	139	173	147	546	6.039.000	37.269.000	43.201.000	55.455.000	50.030.000	191.994.000
	3	Pemeliharaan dan perawatan rumah susun	Tower	4	3	8	9	6	30	1.780.000	2.702.000	8.211.000	9.473.000	6.800.000	28.966.000
	1	Jumlah rumah susun yang dipelihara	Tower	4	3	8	9	6	30	1.780.000	2.702.000	8.211.000	9.473.000	6.800.000	28.966.000